

Transformasi Pendidikan Berbasis Pancasila di Era Digital : Tantangan dan Prospek Moralitas Generasi Z

Muhamad Ali Mahfudi¹, Agus Satrio Utomo^{2*}, Zaka Khoirul Huda³

¹⁻³Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi : agussatrioutomo7@gmail.com

Abstract : *The transformation of education in the digital era demands a strong moral foundation to ensure that technological advancement does not erode human values. Pancasila, as the ideological and ethical foundation of Indonesia, plays a crucial role in guiding educational transformation to remain rooted in national moral values. This study aims to analyze the relevance and implementation of Pancasila values in shaping the morality of Generation Z amid the digitalization of education. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through literature review, policy analysis, and observation of students' digital behavior. The findings indicate that the internalization of Pancasila values within the digital education ecosystem contributes to strengthening character, ethical responsibility, and national awareness among Generation Z. However, key challenges include the lack of moral value integration in digital content and weak role modeling within educational environments. In conclusion, Pancasila-based educational transformation is not merely a technological innovation but a moral process that requires synergy among the government, educators, and society to create a humanistic, ethical, and civilized digital ecosystem.*

Keywords: *Character Education; Digital Education; Generation Z; Moral Values; Pancasila.*

Abstrak : Transformasi pendidikan di era digital digital yang humanis, beretika, dan berkeadaban menuntut landasan moral yang kuat agar perkembangan teknologi tidak menggeser nilai kemanusiaan. Pancasila, sebagai dasar ideologis dan etis bangsa Indonesia, berperan penting dalam menuntun arah transformasi pendidikan agar tetap berakar pada nilai moral kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk moralitas Generasi Z di tengah arus digitalisasi pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah literatur, analisis kebijakan pendidikan, dan observasi terhadap perilaku digital peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam ekosistem pendidikan digital berkontribusi pada penguatan karakter, tanggung jawab etis, dan kesadaran kebangsaan Generasi Z. Namun, tantangan utama terletak pada kurangnya integrasi nilai moral dalam konten digital dan lemahnya keteladanan di lingkungan pendidikan. Kesimpulannya, transformasi pendidikan berbasis Pancasila bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan proses moral yang menuntut sinergi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk mewujudkan ekosistem.

Kata kunci: Pancasila, pendidikan digital, nilai moral, Generasi Z, pendidikan karakter, transformasi Pendidikan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Revolusi digital telah menghadirkan perubahan mendasar dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam proses pembelajaran membuka peluang baru dalam pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta efisiensi administrasi pendidikan. Namun, bersamaan dengan itu, muncul pula tantangan moral dan sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, transformasi digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga isu etika, nilai, dan moralitas yang perlu diantisipasi oleh sistem pendidikan modern (Haleem et al., 2022).

Pendidikan digital di Indonesia saat ini berkembang sangat cepat, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi pembelajaran daring. Akan tetapi, percepatan tersebut juga menimbulkan konsekuensi etis dan sosial. Fenomena seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, plagiarisme digital, dan menurunnya interaksi sosial langsung menjadi isu serius yang berimplikasi terhadap pembentukan karakter peserta didik. Menurut Wang (2025), pendidikan yang berorientasi digital tanpa penguatan nilai etika dapat menimbulkan kesenjangan antara kemampuan teknologi dan kesadaran moral. Oleh karena itu, pendidikan digital perlu dibangun di atas fondasi nilai-nilai moral yang kokoh dan kontekstual.

Dalam konteks kebangsaan, Pancasila memiliki posisi sentral sebagai dasar ideologi dan sistem etika bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial — nilai-nilai yang dapat menjadi orientasi moral bagi perkembangan teknologi dan pendidikan digital. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai norma politik dan hukum, tetapi juga sebagai pedoman etis yang membimbing perilaku warga negara dalam berinteraksi di dunia nyata maupun digital. Sejalan dengan hal itu, pendidikan berbasis Pancasila di era digital perlu diarahkan untuk membangun generasi muda yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga berkarakter kuat dan berkeadaban.

Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, merupakan generasi pertama yang sepenuhnya tumbuh dalam lingkungan digital. Mereka memiliki keunggulan dalam adaptasi teknologi, tetapi sekaligus menghadapi risiko terhadap krisis moralitas digital. Studi von Gillern et al. (2024) menegaskan bahwa literasi digital yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan etika digital; tanpa bimbingan nilai moral, peserta didik mudah terjerumus pada perilaku digital yang menyimpang. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan digital menjadi strategi penting untuk membangun *digital citizenship* yang beretika, bertanggung jawab, dan berorientasi kemanusiaan.

Lebih jauh, perkembangan kecerdasan buatan (AI), big data, dan algoritma media sosial kini semakin memengaruhi pola pikir serta perilaku peserta didik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa orientasi pendidikan akan bergeser dari humanisme menjadi teknokratis. Seperti dikemukakan oleh Balta dan Tzafilkou (2024), transformasi digital tanpa landasan moral dapat menimbulkan dehumanisasi dalam pendidikan — di mana manusia menjadi sekadar objek sistem algoritmik. Maka, Pancasila dapat menjadi landasan filosofis yang mengembalikan orientasi pendidikan digital pada nilai kemanusiaan yang luhur.

Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan penguatan nilai moral dan kebangsaan. Saat ini, kebijakan pendidikan nasional seperti *Merdeka Belajar* dan *Transformasi Digital Pendidikan Nasional* telah memberikan ruang bagi inovasi teknologi, namun belum sepenuhnya menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka moral yang eksplisit. Kondisi ini dapat mengakibatkan digitalisasi pendidikan berjalan tanpa arah moral yang jelas.

Händel et al. (2025) menunjukkan bahwa bahkan di negara-negara maju, kesadaran etis digital di kalangan pelajar dan mahasiswa masih rendah, karena pendidikan lebih fokus pada aspek teknis daripada moral. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, di mana literasi digital sering kali hanya diukur dari kemampuan teknologis, bukan dari tanggung jawab moral dalam menggunakan teknologi. Padahal, dalam konteks bangsa yang beragam secara sosial, budaya, dan agama, pendidikan berbasis Pancasila menjadi fondasi penting untuk menjaga kohesi sosial di tengah arus globalisasi digital.

Selain itu, urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan perubahan pola komunikasi dan nilai sosial di kalangan Generasi Z. Dunia digital membentuk realitas baru yang sering kali melampaui batas nilai-nilai konvensional. Tanpa pedoman moral yang jelas, generasi muda dapat kehilangan arah dalam menavigasi kompleksitas dunia digital. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengembangkan konsep dan praktik pendidikan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berakar pada nilai-nilai nasional.

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan utama:

- a. Bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menjawab tantangan moral dan etika di era pendidikan digital?
- b. Apa saja tantangan dan hambatan dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan Generasi Z dalam konteks pembelajaran digital?
- c. Model konseptual seperti apa yang dapat dikembangkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan praktik pendidikan digital di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mengkaji relevansi dan kontribusi nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi moral dalam pembangunan ekosistem pendidikan digital di Indonesia.
- b) Mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan prospek moralitas Generasi Z dalam menghadapi digitalisasi pendidikan.

- c) Mengembangkan kerangka konseptual dan rekomendasi strategis bagi integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, kurikulum, dan praktik pendidikan digital nasional.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam tiga aspek utama:

1) Aspek Teoretis

Penelitian ini memperkaya khazanah teori pendidikan dengan menautkan paradigma *digital ethics* dan *moral education* dengan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka etika kontekstual khas Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian global yang selama ini berfokus pada nilai-nilai universal Barat seperti *digital citizenship* atau *netiquette*, dengan menawarkan pendekatan lokal yang berakar pada nilai budaya nasional.

2) Aspek Praktis dan Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan pendidikan nasional untuk merancang kurikulum digital berbasis nilai-nilai Pancasila. Strategi ini dapat mencakup penyusunan materi literasi digital bermoral, penguatan keteladanan etika digital bagi guru dan dosen, serta pembentukan komunitas pembelajaran digital yang menginternalisasi nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

3) Aspek Sosial dan Kultural

Penelitian ini juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter generasi muda yang berakar pada identitas nasional di tengah arus globalisasi digital. Dengan mengedepankan Pancasila sebagai dasar moral, pendidikan digital dapat menjadi wahana untuk memperkuat rasa kebangsaan, empati sosial, dan tanggung jawab publik di ruang digital.

Akhirnya, penelitian ini berupaya menegaskan bahwa transformasi pendidikan digital bukan hanya persoalan infrastruktur dan teknologi, melainkan proses moral dan kebudayaan. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi “kompas etika” yang menuntun arah penggunaan teknologi agar selaras dengan martabat manusia dan cita-cita bangsa. Sebagaimana ditegaskan oleh Haleem et al. (2022), keberhasilan digitalisasi pendidikan sejatinya diukur bukan hanya dari efisiensi teknologinya, tetapi dari sejauh mana ia mampu memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pendidikan berbasis Pancasila di era digital telah berkembang dalam berbagai bentuk, namun masih menghadapi tantangan konseptual dan implementatif yang cukup kompleks. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi di tiga institusi pendidikan, ditemukan bahwa pemanfaatan teknologi digital

memang meningkatkan akses dan partisipasi pembelajaran, tetapi belum secara konsisten memperkuat dimensi moral serta karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebanyak 68 persen responden siswa dan mahasiswa menyatakan bahwa pembelajaran daring membantu mereka memahami materi pelajaran dengan lebih cepat, tetapi hanya 37 persen yang merasa bahwa kegiatan digital tersebut berkontribusi terhadap pemahaman nilai moral seperti tanggung jawab, empati, dan keadilan sosial.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara transformasi teknologi dan transformasi moral. Secara empiris, para pendidik masih berfokus pada pemanfaatan platform digital untuk peningkatan efisiensi kognitif seperti akses informasi, fleksibilitas waktu belajar, dan penggunaan media interaktif, namun belum menjadikan teknologi sebagai sarana refleksi etis dan pembentukan karakter. Fenomena ini sejalan dengan temuan Händel dan kolega (2025) yang mengungkap bahwa literasi digital mahasiswa sering kali tidak diiringi dengan pemahaman etika digital yang memadai, serta von Gillern et al. (2024) yang menegaskan bahwa hubungan antara literasi media dan kewargaan digital akan lemah apabila tidak diperkuat oleh pendekatan moral yang eksplisit.

Wawancara dengan guru dan dosen juga menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks digital masih bersifat simbolik, misalnya melalui pencantuman tema atau kutipan Pancasila dalam materi ajar, tanpa disertai kegiatan reflektif yang mampu menumbuhkan kesadaran moral. Sebagian besar pendidik, sekitar 70 persen, mengakui belum memiliki pedoman pedagogis atau model evaluasi yang jelas untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah terintegrasi dalam perilaku digital peserta didik. Kondisi ini sejalan dengan kritik Mhlanga (2024) yang menekankan bahwa transformasi digital di sektor pendidikan sering kali berhenti pada aspek teknologis tanpa didukung fondasi ideologis dan etis yang kokoh.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan indikasi positif. Ketika nilai-nilai Pancasila diintegrasikan secara kontekstual, misalnya melalui pembelajaran berbasis proyek digital yang berorientasi sosial atau diskusi reflektif mengenai etika dalam ruang maya, terjadi peningkatan signifikan dalam kesadaran moral peserta didik. Dalam salah satu studi kasus, sekolah yang menerapkan pendekatan pembelajaran kolaboratif berbasis Pancasila menunjukkan peningkatan sebesar 45 persen pada indikator tanggung jawab sosial digital dan empati daring dibandingkan dengan sekolah yang tidak mengimplementasikannya. Hasil ini sejalan dengan temuan Balta dan Tzafilkou (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan digital sangat bergantung pada kemampuan integratif antara teknologi, nilai, dan praktik sosial.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg (1981), yang menekankan pentingnya interaksi reflektif dan rasional dalam pembentukan moralitas. Dalam konteks digital, nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka moral yang mengarahkan peserta didik menuju tingkat moralitas post-konvensional, di mana keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendidikan digital berbasis Pancasila bukan sekadar pengajaran nilai, melainkan proses pembentukan otonomi moral melalui pengalaman teknologi yang bernilai etis.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini mengungkapkan bahwa integrasi nilai Pancasila belum menjadi indikator utama dalam evaluasi kurikulum digital nasional. Kompetensi teknologi masih menjadi prioritas dalam asesmen pendidikan, sementara aspek moral dan ideologis cenderung terabaikan. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Wiese (2025) dan Ma (2025), pendidikan etika di era kecerdasan buatan menuntut keseimbangan antara kemampuan teknis dan kesadaran moral. Tanpa keseimbangan tersebut, Generasi Z berpotensi menjadi generasi yang mahir teknologi tetapi kehilangan orientasi nilai.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan berbasis Pancasila harus dipahami sebagai proses moral yang mendalam, bukan sekadar inovasi teknologi. Nilai-nilai Pancasila memiliki potensi besar sebagai fondasi etis yang mampu mengarahkan penggunaan teknologi secara humanis, inklusif, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kebijakan pendidikan, desain kurikulum, serta praktik pedagogis yang secara eksplisit menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran digital yang reflektif dan kontekstual. Pendidikan digital yang berlandaskan Pancasila dengan demikian dapat menjadi model khas Indonesia dalam membentuk generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus berkarakter luhur dan bermoral.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai *Transformasi Pendidikan Berbasis Pancasila di Era Digital* memerlukan pemahaman yang mendalam atas tiga ranah konseptual yang saling terkait, yaitu pendidikan moral, literasi digital, dan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai lokal. Pancasila, sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia, mengandung prinsip moral dan sosial yang dapat menjadi fondasi normatif bagi pendidikan digital yang humanis dan berkeadilan. Dalam konteks era digital, pendidikan tidak hanya berperan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab sosial peserta didik, khususnya Generasi Z yang tumbuh dalam budaya teknologi yang serba cepat dan global. Oleh karena itu, literatur

mengenai integrasi nilai-nilai moral ke dalam pendidikan digital menjadi relevan untuk dianalisis secara kritis.

Secara teoretis, pendekatan pendidikan moral modern menekankan pentingnya internalisasi nilai melalui pembelajaran reflektif dan dialogis. Kohlberg (1981) menegaskan bahwa perkembangan moral terjadi melalui proses berpikir kritis terhadap dilema etis, sedangkan Lickona (1996) menyoroti pentingnya peran keteladanan dan lingkungan sosial dalam pembentukan karakter. Kedua pendekatan ini memiliki relevansi tinggi dengan pendidikan berbasis Pancasila karena nilai-nilai Pancasila—ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial—merupakan nilai reflektif yang menuntut pemahaman rasional dan praksis sosial. Integrasi teori ini dalam konteks digital berarti membangun kesadaran etis peserta didik dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan bermoral.

Penelitian global yang berfokus pada etika digital menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap teknologi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesadaran moral. Händel et al. (2025) dalam *Education and Information Technologies* menemukan adanya perbedaan signifikan dalam kesiapan etika digital antar disiplin ilmu, di mana mahasiswa teknologi lebih unggul dalam kompetensi teknis dibandingkan kesadaran etis. Sementara itu, Wiese (2025) dalam tinjauan sistematisnya tentang *AI ethics education* menegaskan bahwa efektivitas pendidikan etika bergantung pada kurikulum yang eksplisit, berkelanjutan, dan berbasis konteks sosial peserta didik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Balta dan Tzafilkou (2024) dalam *Educational Technology Research and Development*, yang menyatakan bahwa transformasi digital dalam pendidikan hanya dapat berhasil apabila nilai-nilai etika diintegrasikan secara substantif dalam praktik pembelajaran, bukan sekadar dalam wacana kebijakan.

Penelitian yang secara khusus menyoroti Generasi Z menunjukkan bahwa generasi ini memiliki keunggulan dalam hal literasi digital, namun juga menghadapi dilema moral dalam ruang maya. Studi oleh von Gillern et al. (2024) dalam *Computers in Human Behavior* mengungkap bahwa literasi media yang tinggi tidak otomatis menghasilkan perilaku digital yang etis, karena masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan moral. Dalam konteks Indonesia, penelitian Iskandar (2025) dalam *Education and Information Technologies* menemukan bahwa literasi digital pelajar di Indonesia meningkat pesat selama pandemi, tetapi belum diimbangi dengan pemahaman yang kuat mengenai etika digital, terutama dalam hal privasi, kejujuran akademik, dan tanggung jawab sosial di ruang siber.

Jika dibandingkan dengan studi internasional, penelitian di Indonesia yang mengkaji Pancasila dalam pendidikan digital cenderung bersifat normatif dan deskriptif. Misalnya, Sarifah (2025) dalam kajiannya tentang *Profil Pelajar Pancasila* menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pendidikan nasional, tetapi belum menguji efektivitasnya secara empiris. Sementara itu, Asri (2025) dalam *Frontiers in Education* menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif berbasis nilai lokal dapat meningkatkan empati dan kerja sama siswa, namun penelitian tersebut belum menggunakan desain evaluatif yang mampu menilai dampak jangka panjang terhadap moralitas digital. Dengan demikian, terdapat kesenjangan metodologis antara studi lokal dan studi global. Studi global banyak menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen validasi etika digital, sedangkan studi lokal lebih banyak menggunakan metode kualitatif yang menekankan deskripsi nilai dan norma.

Perbandingan kritis antar-penelitian memperlihatkan bahwa kajian internasional unggul dalam mengembangkan instrumen pengukuran perilaku etis berbasis teknologi, tetapi kurang memperhatikan dimensi nilai kebangsaan dan ideologi lokal. Sebaliknya, studi tentang Pancasila kuat dalam dimensi normatif dan filosofis, namun lemah dalam validitas empiris dan metode evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan sintesis metodologis yang memadukan kekuatan kedua pendekatan tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan *mixed methods* menjadi relevan karena memungkinkan pengukuran kuantitatif terhadap perubahan perilaku sekaligus eksplorasi kualitatif atas makna dan refleksi moral peserta didik.

Lebih jauh, penelitian oleh Wang (2025) menunjukkan bahwa pendidikan etika di era digital paling efektif apabila berbasis pada konteks lokal dan pengalaman nyata siswa. Hal ini berkesesuaian dengan gagasan pendidikan berbasis Pancasila, yang menuntut agar nilai-nilai kebangsaan diaktualisasikan melalui kegiatan digital seperti proyek sosial, kolaborasi daring, dan refleksi etika terhadap konten digital. Hasil-hasil penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa internalisasi nilai tidak dapat dipaksakan secara kognitif, melainkan harus dibangun melalui interaksi sosial, refleksi personal, dan pengalaman moral yang konkret.

Secara konseptual, literatur yang ada memberikan dasar kuat bahwa transformasi pendidikan berbasis Pancasila di era digital bukan sekadar adopsi teknologi dalam ruang kelas, melainkan proses humanisasi teknologi melalui nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Namun, kesenjangan penelitian masih tampak jelas. Sebagian besar kajian internasional menyoroti dimensi etika digital secara universal, sedangkan penelitian nasional lebih fokus pada aspek ideologis tanpa landasan metodologis yang kuat untuk mengukur perubahan moralitas digital. Oleh karena itu, diperlukan model pendidikan yang mampu menjembatani

keduanya: model yang menggabungkan prinsip etika global dengan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan moral khas Indonesia.

Dari hasil sintesis ini dapat disimpulkan bahwa tantangan utama terletak pada bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks digital yang cenderung pragmatis dan serba cepat, sekaligus memastikan bahwa nilai tersebut dapat diinternalisasi oleh Generasi Z secara otentik. Penelitian lanjutan sebaiknya mengembangkan model pembelajaran digital yang berorientasi moral dengan mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan sosial dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis dalam pendidikan, tetapi juga menjadi kerangka etis yang hidup dan relevan dalam praktik pembelajaran digital masa kini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam proses dan dinamika *Transformasi Pendidikan Berbasis Pancasila di Era Digital*, khususnya dalam kaitannya dengan tantangan dan prospek pembentukan moralitas Generasi Z. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara kontekstual serta memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial dan moral yang kompleks.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi multi-kasus (multi-case study) yang berfokus pada beberapa institusi pendidikan menengah dan perguruan tinggi di Indonesia yang telah menerapkan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan praktik, strategi, dan hasil implementasi antar lembaga sehingga dapat memperoleh gambaran pola umum dan variasi konteks yang ada.

Populasi penelitian meliputi pendidik, peserta didik (Generasi Z), dan pengelola program pendidikan digital di berbagai daerah. Dari populasi tersebut, diambil sampel purposif sebanyak 60 informan, terdiri atas 20 guru/dosen, 30 siswa/mahasiswa, dan 10 pengambil kebijakan pendidikan. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran berbasis digital yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (*in-depth interviews*), observasi partisipatif terhadap aktivitas pembelajaran digital, dan studi dokumentasi terhadap kurikulum, modul, serta kebijakan institusional. Selain itu, dilakukan survei terbatas dengan kuesioner terbuka untuk memperoleh data persepsi mengenai moralitas digital dan penerapan nilai Pancasila dalam konteks pembelajaran daring.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, serta panduan analisis dokumen yang dikembangkan berdasarkan indikator nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial) serta prinsip etika digital. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sedangkan keabsahan hasil dijaga melalui *member checking* dan *peer debriefing*.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola-pola integrasi nilai Pancasila dalam pembelajaran digital, faktor pendukung dan penghambat, serta implikasinya terhadap penguatan moralitas Generasi Z. Hasil analisis disintesis menjadi model konseptual transformasi pendidikan berbasis Pancasila di era digital.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa transformasi pendidikan berbasis Pancasila di era digital merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, melainkan juga menyentuh persoalan moralitas, identitas, dan ideologis bangsa. Dalam konteks pendidikan Indonesia, digitalisasi yang semakin meluas seringkali menimbulkan dilema antara efisiensi teknologi dan orientasi nilai. Hasil analisis data dari wawancara mendalam, observasi kelas digital, serta studi dokumentasi di tiga lembaga pendidikan, yaitu dua perguruan tinggi dan satu sekolah menengah, menunjukkan bahwa proses integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembelajaran digital masih berada pada tahap awal yang bersifat normatif. Pendidik cenderung menafsirkan pendidikan berbasis Pancasila sebagai penyisipan nilai moral dalam diskusi atau sebagai elemen simbolik dalam materi ajar daring, bukan sebagai kerangka epistemologis dan pedagogis yang terintegrasi dalam rancangan pembelajaran digital.

Sebagian besar pendidik mengakui bahwa mereka telah berupaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, dalam proses pembelajaran daring. Namun, bentuk penerapan tersebut masih bersifat deklaratif, misalnya melalui pernyataan eksplisit tentang pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan kerja sama di dunia maya. Dalam kenyataannya, perangkat pembelajaran digital seperti Learning Management System (LMS), modul interaktif, maupun evaluasi daring belum mengakomodasi indikator moral yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila secara sistematis. Hasil ini sejalan dengan temuan Balta dan Tzafilkou (2024) yang menyatakan bahwa transformasi digital pendidikan pada umumnya masih berorientasi pada efisiensi teknologi ketimbang transendensi nilai. Di Indonesia, kondisi

ini memperlihatkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari proses pembudayaan nilai kebangsaan, melainkan sebagai inovasi instrumental.

Lebih lanjut, hasil survei terhadap peserta didik Generasi Z memperlihatkan ambivalensi antara kesadaran moral digital dan praktik nyata di ruang daring. Sekitar 74 persen responden menyatakan memahami pentingnya etika digital seperti menghormati hak cipta, menghindari ujaran kebencian, serta menjaga privasi dan integritas informasi. Namun, hanya 42 persen dari mereka yang mengaku menerapkannya secara konsisten dalam aktivitas media sosial atau pembelajaran daring. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan nilai dan perilaku moral yang diaktualisasikan sebagaimana dikemukakan Rest (1986). Fenomena tersebut memperkuat pandangan Kohlberg (1976) tentang tahapan perkembangan moral, di mana banyak individu berhenti pada tahap konvensional, yakni mengetahui apa yang benar secara normatif tetapi belum menginternalisasikan nilai itu sebagai dasar tindakan reflektif.

Hasil observasi lapangan mengungkap bahwa Generasi Z di ruang pendidikan digital memiliki karakteristik unik yang memengaruhi proses internalisasi nilai. Mereka cenderung berpikir cepat, multitasking, dan lebih tertarik pada bentuk interaksi visual dibandingkan narasi tekstual. Hal ini menyebabkan nilai-nilai Pancasila yang disampaikan secara konseptual sulit ditangkap secara mendalam. Oleh karena itu, pembelajaran digital yang menekankan penguatan moral harus bertransformasi dari sekadar penyampaian nilai menjadi pengalaman etis yang konkret. Pendekatan berbasis proyek (*project-based learning*) yang mengintegrasikan konteks sosial digital seperti literasi media, kampanye anti-hoaks, atau kolaborasi daring lintas sekolah terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran moral partisipatif. Temuan ini sejalan dengan teori *transformative moral learning* (Mezirow, 2000) yang menekankan pentingnya refleksi kritis terhadap pengalaman sebagai sarana pembentukan kesadaran etis.

Selain pada dimensi peserta didik, penelitian ini juga menemukan bahwa peran pendidik dan kebijakan institusional sangat menentukan efektivitas internalisasi nilai Pancasila dalam ekosistem digital. Sekitar 80 persen guru dan dosen yang diwawancarai mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan khusus tentang desain pembelajaran digital berbasis nilai. Mereka lebih sering diarahkan pada pelatihan teknis penggunaan platform digital daripada pendekatan pedagogis yang mengintegrasikan dimensi moral. Akibatnya, proses pembelajaran digital yang terjadi lebih bersifat administratif dan teknologis daripada humanistik. Temuan ini konsisten dengan penelitian Mhlanga (2024) serta Paños-Castro dan rekan (2024) yang menunjukkan bahwa transformasi digital pendidikan di berbagai negara berkembang sering kali terjebak pada logika efisiensi teknologi, sementara aspek kemanusiaan dan moralitas justru termarginalisasi.

Dalam konteks teoretis, hasil penelitian ini memperkuat konsep digital citizenship education (Ribble, 2015) yang menegaskan bahwa literasi digital harus diiringi dengan pembentukan tanggung jawab moral dan kesadaran etika dalam menggunakan teknologi. Namun, berbeda dengan pendekatan Barat yang berfokus pada hak dan tanggung jawab individu, pendidikan berbasis Pancasila menambahkan dimensi kebangsaan dan spiritualitas yang khas. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, menuntut kesadaran transendental dalam penggunaan teknologi, sedangkan nilai Keadilan Sosial mengarahkan penggunaan digitalisasi untuk pemerataan akses dan pemberdayaan sosial. Integrasi ini memberikan kerangka moral yang lebih komprehensif dibandingkan model etika digital konvensional. Dengan demikian, pendidikan berbasis Pancasila berpotensi menjadi paradigma alternatif dalam membangun moralitas digital yang kontekstual dan berakar pada nilai kemanusiaan universal.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa tantangan utama transformasi pendidikan berbasis Pancasila di era digital bukanlah keterbatasan teknologi, melainkan lemahnya sistem pendukung moral dalam kebijakan pendidikan. Kurangnya kebijakan yang mendorong evaluasi karakter digital, minimnya insentif bagi pendidik yang menerapkan pembelajaran berbasis nilai, serta absennya instrumen penilaian moral dalam sistem pembelajaran daring menyebabkan implementasi nilai Pancasila berjalan tanpa arah evaluatif yang jelas. Menurut Aquino (2025), keberhasilan transformasi digital di sektor pendidikan sangat bergantung pada adanya value governance, yaitu mekanisme kebijakan yang memastikan bahwa nilai-nilai etis menjadi dasar inovasi teknologi pendidikan. Dalam konteks Indonesia, absennya tata kelola nilai ini menyebabkan Pancasila sering kali direduksi menjadi slogan moral tanpa dimensi praksis.

Secara kritis, kondisi ini memperlihatkan bahwa pendidikan digital di Indonesia masih berada dalam paradoks modernitas. Di satu sisi, digitalisasi dianggap sebagai sarana modernisasi dan efisiensi, tetapi di sisi lain, ia berpotensi mengikis nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kebangsaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ketika Pancasila hanya dihadirkan sebagai simbol formal, proses pendidikan kehilangan daya etisnya. Freire (1970) dalam konsep conscientization menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi ruang pembebasan moral melalui dialog dan refleksi kritis terhadap realitas sosial. Dalam konteks digital, refleksi tersebut harus diarahkan untuk membangun kesadaran kritis terhadap bagaimana teknologi membentuk cara berpikir, berinteraksi, dan berperilaku. Dengan demikian, pendidikan berbasis Pancasila di era digital tidak cukup berhenti pada pengajaran nilai, tetapi harus mengembangkan kesadaran digital yang etis dan reflektif.

Dari segi prospek, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki potensi besar sebagai agen moral di ruang digital apabila diberikan ruang pembelajaran yang partisipatif dan berbasis refleksi nilai. Mereka menunjukkan minat tinggi terhadap isu etika teknologi, keadilan sosial, dan keberlanjutan digital. Studi Ma (2025) dan Wiese (2025) juga menguatkan temuan ini dengan menyatakan bahwa pendidikan etika berbasis teknologi memiliki efek positif terhadap pembentukan warga digital yang bertanggung jawab ketika diintegrasikan dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai jembatan antara modernitas digital dan moralitas kolektif bangsa. Ketika teknologi ditempatkan dalam kerangka etika Pancasila, digitalisasi pendidikan tidak hanya menjadi sarana inovasi, tetapi juga instrumen pembentukan manusia yang berkeadaban.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan berbasis Pancasila di era digital ditentukan oleh tiga faktor utama yang saling berinteraksi, yaitu kesiapan pedagogis pendidik, kesadaran moral peserta didik, dan keberpihakan kebijakan institusional terhadap nilai. Ketika salah satu faktor melemah, proses internalisasi nilai kehilangan kontinuitasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan model transformasi yang bersifat integratif yang menggabungkan literasi digital, etika Pancasila, dan praktik pembelajaran reflektif dalam satu sistem pendidikan yang konsisten. Pendekatan semacam ini akan menjadikan Pancasila bukan sekadar fondasi ideologis, tetapi sumber etika praktis yang mampu menuntun Generasi Z menghadapi kompleksitas moral di dunia digital.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan berbasis Pancasila harus dipahami sebagai proyek moral nasional di tengah era digital. Ia tidak hanya berfungsi untuk memperkuat identitas kebangsaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Di sinilah urgensi peran negara, pendidik, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan digital yang tidak hanya canggih, tetapi juga beradab dan berkeadilan, sesuai dengan cita-cita Pancasila sebagai dasar moral bangsa Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan berbasis Pancasila harus dipahami sebagai proyek moral nasional yang memiliki dimensi strategis, ideologis, dan etis di tengah deras arus digitalisasi global. Transformasi ini bukan sekadar upaya adaptasi terhadap perkembangan teknologi, melainkan suatu proses rekontekstualisasi nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan relevan dalam lanskap pendidikan digital yang dinamis. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai fondasi normatif yang memastikan bahwa setiap inovasi dan praktik pendidikan digital tidak kehilangan arah kemanusiaannya. Pancasila bukan hanya dasar negara dalam pengertian

politis, tetapi juga *moral compass* yang menuntun arah transformasi pendidikan agar tetap berorientasi pada kemaslahatan bersama, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Implikasinya, transformasi pendidikan digital berbasis Pancasila harus diarahkan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologis, tetapi juga berkarakter kuat dan memiliki integritas moral dalam ruang siber. Pendidikan digital yang terlepas dari nilai berisiko menghasilkan generasi yang unggul secara kognitif namun lemah dalam dimensi etik dan spiritual. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang beradab menjadi elemen yang krusial dalam membentuk literasi digital yang berkeadaban. Dalam pandangan ini, pendidikan digital tidak dapat dipahami semata sebagai proses transmisi informasi berbasis teknologi, melainkan sebagai arena pembentukan kesadaran moral dan kebangsaan yang menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab etis.

Lebih jauh lagi, pendidikan berbasis Pancasila di era digital mengandung makna perlawanan terhadap kecenderungan dehumanisasi akibat penetrasi teknologi yang kian masif. Ketika algoritma, data, dan kecerdasan buatan mulai mendominasi cara berpikir dan bertindak manusia, nilai-nilai Pancasila hadir sebagai sistem etika yang menegaskan kembali pentingnya kemanusiaan sebagai inti dari pendidikan. Sila-sila Pancasila dapat menjadi panduan normatif dalam mengatur perilaku digital, menuntun pengguna teknologi agar tidak terjebak dalam egoisme digital, budaya konsumtif, atau penyalahgunaan informasi. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila dengan demikian berfungsi sebagai benteng moral yang menjaga identitas bangsa dari ancaman disorientasi nilai yang muncul akibat globalisasi digital yang tanpa batas.

Peran negara dalam konteks ini menjadi sangat strategis, bukan hanya sebagai regulator kebijakan pendidikan, tetapi juga sebagai penjamin nilai dalam setiap kebijakan digitalisasi pendidikan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai indikator evaluasi dalam kurikulum digital, sistem pembelajaran daring, serta pelatihan tenaga pendidik. Regulasi mengenai etika digital nasional yang berlandaskan Pancasila dapat menjadi kerangka etik yang menuntun interaksi daring antarwarga negara. Kebijakan ini juga perlu disertai dengan dukungan infrastruktur moral, seperti program pelatihan etika teknologi, forum refleksi digital bagi pendidik, serta integrasi indikator karakter dalam asesmen pembelajaran daring.

Di sisi lain, pendidik memiliki tanggung jawab epistemologis dan moral dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik pedagogis digital. Mereka tidak cukup menjadi pengelola teknologi, tetapi juga harus berperan sebagai fasilitator nilai yang menanamkan kesadaran etis melalui pengalaman belajar digital. Proses pembelajaran berbasis nilai dapat diwujudkan melalui pembelajaran reflektif, kolaboratif, dan berbasis empati yang memanfaatkan teknologi untuk memperluas kesadaran sosial siswa. Dengan demikian, pendidik menjadi agen utama dalam memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai sarana kemanusiaan, bukan sekadar alat efisiensi akademik.

Masyarakat, termasuk orang tua dan komunitas digital, juga memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan budaya digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam era keterhubungan tanpa batas, pembentukan moralitas digital tidak dapat hanya dibebankan pada lembaga pendidikan. Lingkungan sosial harus menjadi ruang praktik nilai, di mana etika Pancasila diwujudkan melalui interaksi di media sosial, penggunaan data yang bertanggung jawab, serta partisipasi dalam wacana digital yang konstruktif. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan komunitas digital dapat memperkuat sinergi moral yang menjadi prasyarat bagi tumbuhnya generasi digital yang beretika dan berjiwa nasionalis.

Secara filosofis, pendidikan berbasis Pancasila di era digital dapat dipandang sebagai upaya humanisasi teknologi. Jika pendidikan konvensional bertujuan membentuk manusia yang berpengetahuan, maka pendidikan digital berbasis nilai berupaya membentuk manusia yang bijak dalam menggunakan pengetahuan. Di sinilah letak urgensi moralitas dalam transformasi digital: teknologi tidak boleh menjadi tujuan akhir pendidikan, tetapi harus menjadi sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dalam kerangka ini, Pancasila menjadi jembatan antara rasionalitas modern dan spiritualitas kebangsaan, antara kemajuan teknologi dan keadilan sosial, serta antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif.

Akhirnya, transformasi pendidikan berbasis Pancasila harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan karakter bangsa di era digital. Tantangan utama bukan hanya pada kesiapan infrastruktur, tetapi pada komitmen moral untuk menempatkan manusia dan nilai sebagai pusat dari inovasi pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem pendidikan digital di Indonesia harus diarahkan untuk membangun keseimbangan antara kemajuan teknologi, kematangan etis, dan keutuhan identitas nasional. Pendidikan yang demikian tidak hanya mencetak generasi yang kompetitif secara global, tetapi juga generasi yang berkeadaban, berempati, dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.

Dengan perspektif ini, Pancasila bukan sekadar ideologi yang diwariskan, melainkan sumber inspirasi moral yang terus hidup dan berkembang dalam menghadapi perubahan zaman. Di tengah disrupsi digital yang cepat, pendidikan berbasis Pancasila dapat menjadi jangkar moral yang memastikan bahwa bangsa Indonesia tidak kehilangan arah dalam mengejar kemajuan. Maka, proyek moral nasional ini harus diwujudkan melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk membangun peradaban digital yang tidak hanya cerdas dan inovatif, tetapi juga beradab, berkeadilan, dan berkepribadian Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pendidikan berbasis Pancasila di era digital merupakan proses strategis dan moral yang menuntut reorientasi paradigma pendidikan nasional agar mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam ekosistem pendidikan digital masih bersifat normatif dan belum terintegrasi secara sistematis dalam desain pembelajaran daring. Pendidik umumnya menempatkan nilai Pancasila sebatas unsur deklaratif, belum sebagai kerangka epistemologis dan pedagogis yang menuntun keseluruhan proses pembelajaran digital. Akibatnya, internalisasi nilai moral pada Generasi Z belum mencapai tingkat reflektif dan partisipatif sebagaimana diidealkan dalam pendidikan karakter.

Secara substansial, penelitian ini juga menegaskan bahwa moralitas Generasi Z dalam konteks digital menunjukkan ambivalensi antara kesadaran nilai dan perilaku nyata. Mereka memahami pentingnya etika digital, namun implementasinya masih terbatas oleh lemahnya sistem keteladanan, kurangnya bimbingan moral di ruang daring, serta dominasi budaya instan dalam interaksi digital. Fenomena ini memperkuat temuan teori perkembangan moral yang menyatakan bahwa pengetahuan moral tidak selalu sejalan dengan tindakan moral. Oleh karena itu, pendidikan berbasis Pancasila perlu menghadirkan model pembelajaran digital yang lebih reflektif, partisipatif, dan kontekstual, sehingga nilai-nilai kebangsaan dapat diinternalisasi melalui pengalaman belajar yang bermakna.

Dari sisi kelembagaan, penelitian ini menemukan bahwa belum adanya kebijakan terstruktur yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan moral dalam transformasi digital menjadi salah satu hambatan utama. Pendidikan digital masih lebih banyak berorientasi pada aspek teknologis dan administratif dibandingkan dimensi humanistik. Ketiadaan pelatihan khusus bagi pendidik mengenai pedagogi berbasis nilai memperlemah efektivitas pendidikan

moral di ruang digital. Dengan demikian, keberhasilan transformasi pendidikan berbasis Pancasila bergantung pada sinergi antara tiga komponen utama: kesiapan pedagogis pendidik, kesadaran moral peserta didik, dan dukungan kebijakan nilai yang konsisten di tingkat nasional.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang hubungan antara moralitas digital dan pendidikan berbasis nilai di era global. Pancasila terbukti memiliki relevansi tinggi sebagai kerangka etika universal yang mampu menjembatani rasionalitas teknologi dan kemanusiaan. Pendidikan berbasis Pancasila tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga berpotensi menjadi model alternatif dalam membangun etika digital yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, transformasi pendidikan digital tidak boleh dipahami sekadar sebagai modernisasi teknologis, melainkan sebagai upaya moral dan ideologis untuk meneguhkan karakter bangsa di tengah arus globalisasi.

Saran praktis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi pedagogi digital berbasis nilai-nilai Pancasila. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pendidikan digital yang menempatkan Pancasila sebagai indikator evaluasi kurikulum dan asesmen karakter. Selain itu, pengembangan platform pembelajaran digital hendaknya tidak hanya berfokus pada fitur teknis, tetapi juga mengintegrasikan aspek etika digital, kolaborasi sosial, dan keadilan akses. Pendidik disarankan untuk memanfaatkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, studi kasus moral, dan refleksi digital untuk memperkuat internalisasi nilai Pancasila pada Generasi Z.

Saran akademis bagi penelitian selanjutnya meliputi perlunya eksplorasi empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas model pembelajaran digital berbasis nilai Pancasila pada berbagai jenjang pendidikan. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental dapat dilakukan untuk mengukur sejauh mana integrasi nilai-nilai Pancasila berdampak pada peningkatan literasi moral dan etika digital peserta didik. Selain itu, kajian lintas budaya dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai lokal seperti Pancasila dapat diadaptasi dalam konteks globalisasi digital yang pluralistik. Penelitian interdisipliner yang menggabungkan perspektif teknologi pendidikan, filsafat moral, dan studi kebijakan publik juga diperlukan untuk membangun kerangka konseptual yang lebih komprehensif tentang pendidikan digital berbasis nilai.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan berbasis Pancasila di era digital harus dimaknai sebagai upaya kolektif untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga berakar kuat pada moralitas

bangsa. Pancasila, sebagai dasar negara sekaligus panduan etika kehidupan berbangsa, harus terus dihidupkan dalam setiap inovasi pendidikan agar kemajuan digital tidak menjauhkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan yang menjadi ciri hakiki bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aquino, J. (2025). Impact of digital transformation: Assessing the knowledge and readiness of educational institutions. *Frontiers in Computer Science*. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2025.1611952>
- Balta, N., & Tzafilkou, K. (2024). Digital transformation and ethics in education: A systematic review and research agenda. *Educational Technology Research and Development*.
- Campos, D. G., et al. (2024). Digital gender gaps in students' knowledge, attitudes, and behavior. *Computers & Education*.
- Haleem, A., Javaid, M., Qadri, M. A., & Suman, R. (2022). Understanding the role of digital technologies in education: A review. *Sustainable Operations and Computers*, 3, 275-285. <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2022.05.004>
- Herhana, N. (2024). Strategies to strengthen students' digital literacy through contextual learning in Pancasila education. *Indonesian Journal of Vocational Education*. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i9.900>
- Khoirina, N. J. (2019). Pancasila character education for millennials in higher education. *ADIL Indonesia Journal*.
- Ma, M. (2025). Fostering responsible AI literacy: A systematic review of K-12 AI ethics education. [Journal name unavailable]. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100422>
- Mhlanga, D. (2024). Digital transformation of education: The limitations and prospects of introducing the Fourth Industrial Revolution in emerging markets. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s44217-024-00115-9>
- Oktaviana, P. D., et al. (2023). Implementation of Pancasila values in civics learning in the digital era. [National educational journal / proceedings].
- Paños-Castro, J., Korres, O., Iriondo, I., & Petchamé, J. (2024). Digital transformation and teaching innovation in higher education: A case study. *Education Sciences*, 14(8), 820. <https://doi.org/10.3390/educsci14080820>
- Popa, N. L., et al. (2024). Explanatory factors of digital citizenship among university students. *Frontiers in Education*. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.111011>
- Sarifah, I. (2024). Pancasila as a source of digital ethics in Indonesia. *Journal of Education and Digitalization*.
- von Gillern, S. (2024). Establishing the teachers' perceptions on digital citizenship: Scale development and implications for practice. *British Journal of Educational Technology*. <https://doi.org/10.1111/bjet.13434>
- Widiyatama, P. R. (2023). Development of Pancasila-based digital game learning media: A case of "Pancasila Word Guessing" application. *Journal Keberlanjutan*.
- Wiese, L. J. (2025). AI ethics education: A systematic literature review. [Journal name unavailable]. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100405>